

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang)

Dwi Anita Indrawati, ✉ Mohamad Djasuli

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor yang diteliti antara lain kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian dan pengawasan keuangan daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden yang merupakan para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD, yang meliputi kepala atau staf sub PPK-SKPD dan Bendahara SKPD Kabupaten Sampang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan SPSS 16.00. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah

Kata kunci: laporan keuangan pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian dan pengawasan

ABSTRACT

This research was aimed to figure out any factors having influence related to local government financial report information value. Those investigated factors were human resources quality, IT utilization, local financial control and supervisory system. The data collection were conducted by giving questionnaires to respondents working as civil servants whose duty are related to financial management/accounting function at SKPD consisting head or staff of sub PPK-SKPD and treasurer of SKPD Sampang Regency. The collected data were then analyzed by using SPSS 16.00 The test result showed that the quality of human resources contributed significantly positive to local government financial report information value. In addition, IT utilization also gave significantly positive contribution to the value mentioned previously. Internal control system, another factor; influenced significantly positive to the same value while local financial supervision, the last factor in this research, also significantly incited to the value being discussed in this research.

Keywords: local government financial report, human resources quality, IT utilization, local financial control and supervisory system.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2011, dilaporkan kerugian negara mencapai Rp20 triliun dengan 12.600 kasus, kemudian naik pada tahun 2012 dengan 12.947 kasus atau naik 347 kasus. Namun potensi kerugian negara turun menjadi Rp9,7 triliun (BPK, 2012). Kebocoran itu diakibatkan karena ketidakpatuhan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan kasus penyimpangan administrasi. Namun yang paling besar adalah ketidakpatuhan mencapai 60 persen (Qosasih, 2012).

Temuan pemeriksaan BPK dalam semester I tahun 2012 meliputi 13.105 kasus senilai Rp12,48 triliun. Dari jumlah tersebut, 3.976 kasus senilai

8,92 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Sisanya merupakan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, serta kelemahan sistem pengendalian intern. Dari temuan senilai Rp8,92 triliun tersebut, telah ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp311,34 miliar (BPK, 2012).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat potensi kerugian negara sebesar Rp 9,72 triliun mencakup 12.947 kasus pada semester II tahun 2012. Ini ditemukan setelah pemeriksaan 709 objek

✉ Corresponding author :

Address : Jl. Raya Telang No. 2 Kamal Bangkalan

Email : mdjasuli@gmail.com

pemeriksaan, yang terdiri atas 154 objek pemeriksaan kinerja 450 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dan 105 objek pemeriksaan keuangan. Hal tersebut adalah kesalahan yang terjadi secara berulang setiap tahun, sehingga harus ada tindak lanjut dan upaya penanggulangan. Dari total 4.815 kasus merupakan kelemahan sistem pengendalian internal, sebanyak 1.901 kasus penyimpanan administrasi dan sebanyak 2.241 kasus. Terhadap kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan dengan nilai sebesar Rp 5,83 triliun tersebut dan kasus ketidakehematan, dan ketidakefisienan dan ketidakefektifan dengan nilai Rp 3,88 triliun (Jefriando, 2013).

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria kualitatif laporan keuangan, dimana kriteria yang dimaksud adalah relevan, keandalan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Keempat unsur tersebut merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Arfianti, 2011).

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh BPK. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan setiap pemerintah daerah setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pelaporan keuangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat (*public accountability*).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah pada akhirnya akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan, sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Sukmaningrum, 2012).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Armando, 2013). Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini dilakukan pada 31 SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. Hal ini terkait dengan hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sampang yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2011, sementara Pemerintah Kabupaten di Madura lainnya yaitu Pamekasan, Sumenep dan Bangkalan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Soekarno, 2012). Ditemukan pula bahwa Sebanyak sembilan jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura sampai saat ini (Maret 2013) belum mempunyai pejabat difinitif. Dengan kosongnya pimpinan akan menghambat pelayanan dan juga sedikit banyak jalannya pemerintahan juga akan terganggu (Zamachsari, 2013).

Rumusan penelitian ini adalah apakah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah mempunyai pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, baik secara parsial maupun simultan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah

daerah, baik secara parsial maupun simultan.

METODA PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan angka-angka dan perhitungan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis dan memerlukan beberapa alat analisis dan desain penelitiannya meliputi: populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, sumber data, validitas dan reliabilitas instrumen, dan metode analisis data.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang. Pengambilan sampel (*sampling method*) terhadap responden dilakukan secara *purposive*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003).

Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD, yang meliputi kepala atau staf sub PPK-SKPD dan Bendahara SKPD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat Kabupaten, RSUD, 15 Dinas, 9 Badan, 3 Kantor dan Kecamatan Kota Sampang. Total kuesioner yang disebar ke 31 SKPD sebanyak 62 kuesioner yang didistribusikan langsung oleh peneliti kepada responden

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui perantara). Data primer yang diperoleh adalah hasil pengisian kuesioner oleh 62 responden, yaitu kepala atau staf sub PPK-SKPD dan Bendahara SKPD di Kabupaten Sampang. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, yaitu dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden yang telah tersedia jawabannya. Kuesioner dalam penelitian ini diberikan kepada responden, yaitu kepala atau staf sub PPK-SKPD dan Bendahara.

Kuesioner yang dibagikan akan ditunggu oleh peneliti dengan tujuan agar pengisian dari kuesioner tersebut tepat sasaran pada responden yang diinginkan. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Pengukuran masing-masing variabel menggunakan instrumen kuesioner, yang masing-masing variabel diukur dengan model skala *Likert 5* (lima) poin. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan *SPSS 16.00*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini ada dua cara dalam proses pengumpulan kuesioner, yaitu peneliti menunggu di tempat responden pada saat pengisian kuesioner dan beberapa responden meminta sesuai waktu yang ditentukan kuesioner dijemput kembali. Dari 62 kuesioner yang disebar/dibagikan yang kembali sebanyak 54 kuesioner. Tidak ada kuesioner yang cacat/rusak, sehingga seluruh kuesioner yang kembali bisa digunakan untuk melakukan analisis data, yaitu sebanyak 54 kuesioner.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *SPSS 16.00* dengan hasil sebagai berikut:

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya butir-butir pertanyaan dalam kuesioner. Pernyataan dinyatakan valid apabila r tabel $\leq r$ hitung dari validitas yaitu 0,30 sebaliknya apabila r tabel $\geq r$ hitung dari validitas yaitu 0,30 maka pernyataan tidak valid. Teknik pengukuran untuk pengujian validitas yaitu dengan Korelasi *Product Moment* dari Karl Pearson (r) yaitu uji validitas dilakukan untuk mengkorelasikan masing-masing pernyataan dengan skor untuk masing-masing variabel (Sugiyono, 2009).

Hasil uji validitas dari empat variabel independen yaitu kualitas sumber daya manusia (X_1), pemanfaatan teknologi informasi (X_2), sistem pengendalian intern (X_3), pengawasan keuangan daerah (X_4) dan satu variabel dependen (Y) yaitu nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil uji validitas dimana r hitung $\geq r$ tabel (0,30). Hal ini dinyatakan valid, karena semua pernyataan dari masing-masing variabel menunjukkan angka lebih besar dari r tabel (0,30).

Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini, variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $\geq 0,70$ (Sugiyono, 2009). Berikut ini merupakan hasil dari uji reliabilitas:

Tabel 1
Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien <i>Alpha Cronbach</i>	Keterangan
X ₁	0,917	Reliabel
X ₂	0,891	Reliabel
X ₃	0,890	Reliabel
X ₄	0,892	Reliabel
Y	0,859	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2013

Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	N	Mean	Std. Deviation
X1	54	35.67	1.716
X2	54	35.57	1.537
X3	54	35.72	1.837
X4	54	35.57	1.744
Y	54	37.11	1.690

Sumber: Data olahan, 2013

Berdasarkan tabel 1, dijelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (X₁) menunjukkan nilai 0,917, pemanfaatan teknologi informasi (X₂) menunjukkan nilai 0,891, sistem pengendalian intern (X₃) menunjukkan nilai 0,890, pengawasan keuangan daerah (X₄) menunjukkan nilai 0,892 dan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) menunjukkan nilai 0,859. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh instrument penelitian dinyatakan reliabel dan bisa digunakan karena nilai *Cronbach Alpha* $\geq 0,70$.

Statistik Deskriptif

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka diperoleh deskripsi data penelitian sebagai berikut. Dari hasil statistik deskriptif variabel tersebut, dapat dilihat bahwa masing-masing variabel memiliki rata-rata yang berbeda. Untuk variabel Y mempunyai rata-rata paling besar yaitu 37,11, diikuti X₃ dengan rata-rata 35,72, kemudian X₁ dengan rata-rata 35,67 dan terakhir X₂ dan X₄ yang mempunyai rata-rata yang sama yaitu 35,57. Sedangkan untuk standar deviasi dari masing-masing variabel yang paling besar dimiliki oleh X₃ sebesar 1,837, diikuti X₄ sebesar 1,744, kemudian X₁ sebesar 1,716, selanjutnya Y sebesar 1,690 dan terakhir X₂ sebesar 1,537.

Analisa Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y) (Susanti, 2010). Di bawah ini adalah hasil dari perhitungan regresi berganda:

Dari tabel 3, dapat diketahui bahwa persamaan regresi yang dihasilkan sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1KSDM + b_2PTI + b_3SPI + b_4PKD + e$$

$$Y = (-1,254) + 0,214KSDM + 0,251PTI + 0,242SPI + 0,370PKD + e$$

Berdasarkan analisa regresi di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konstanta (a)
Konstanta sebesar 1,254 dan bernilai negatif, artinya semua variabel bebas yaitu kualitas sumber daya manusia (X₁), pemanfaatan teknologi informasi (X₂), sistem pengendalian intern (X₃), pengawasan keuangan daerah (X₄) memiliki nilai nol (0), maka variabel terikat yaitu nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) nilainya adalah -1,254.
2. Kualitas SDM (X₁) terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
Nilai koefisien regresi variabel sumber daya manusia (X₁) sebesar 0,214. Hal ini mengandung arti jika variabel bebas lain nilainya tetap dan sumber daya manusia mengalami kenaikan satu kesatuan, maka variabel terikat yaitu nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) akan naik sebesar 0,214 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia

Tabel 3
Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Koefisien	t-hitung	Sig.
1 (Constant)	-1,254	-0,529	0,599
X ₁	0,214	3,098	0,003
X ₂	0,251	2,689	0,010
X ₃	0,242	3,151	0,003
X ₄	0,370	4,605	0,000

Sumber: Data diolah, 2013

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas dengan Hasil *one-sample Kolmogorov-Smirnov*

Variabel	Sig.	Keterangan
X ₁	0,181	Terdistribusi normal
X ₂	0,109	Terdistribusi normal
X ₃	0,285	Terdistribusi normal
X ₄	0,165	Terdistribusi normal
Y	0,067	Terdistribusi normal

Sumber: Data diolah, 2013

dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

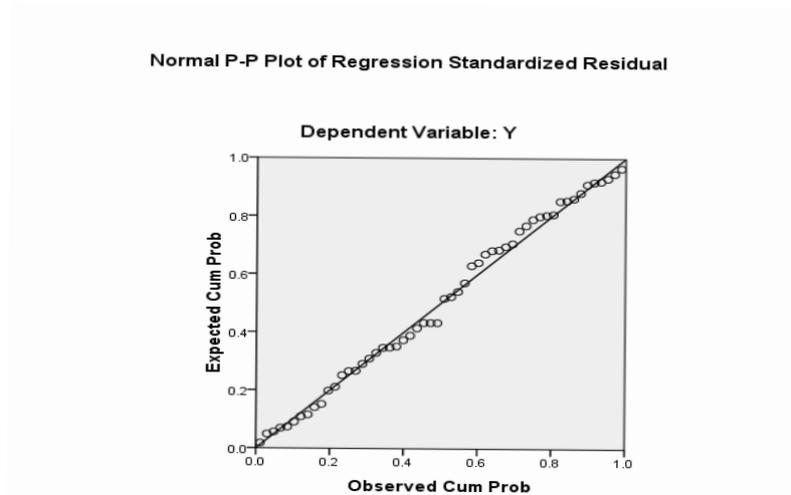
- Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₂) terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
 Nilai koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi (X₂) sebesar 0,251 dan bernilai positif. Hal ini mengandung arti jika variabel bebas lain nilainya tetap dan pemanfaatan teknologi informasi mengalami kenaikan satu kesatuan, maka nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,251 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- Sistem Pengendalian Intern (X₃) terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
 Nilai koefisien regresi variabel sistem pengendalian intern (X₃) sebesar 0,242. Hal ini mengandung arti jika variabel bebas lain nilainya tetap dan sistem pengendalian intern mengalami kenaikan satu kesatuan, maka variabel terikat yaitu nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) akan naik sebesar 0,242 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Koefisien bernilai positif

artinya terjadi hubungan positif antara sistem pengendalian intern dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

- Pengawasan Keuangan Daerah (X₄) terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
 Nilai koefisien regresi variabel pengawasan keuangan daerah (X₄) sebesar 0,370. Hal ini mengandung arti jika variabel bebas lain nilainya tetap dan pengawasan keuangan daerah mengalami kenaikan satu kesatuan, maka variabel terikat yaitu nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) akan naik sebesar 0,370 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pengawasan keuangan daerah dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik, yaitu dengan *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi data residual normal, karena garis yang digambar-



Sumber: Data diolah, 2013

Gambar 2
Uji Normalitas

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constan)			
X ₁	0,614	1,628	Tidak terjadi multiko-linearitas
X ₂	0,420	2,379	Tidak terjadi multiko-linearitas
X ₃	0,436	2,296	Tidak terjadi multiko-linearitas
X ₄	0,440	2,274	Tidak terjadi multiko-linearitas

Sumber: Data diolah, 2013

kan data sebagian besar mengikuti garis diagonalnya. Seperti yang digambarkan dibawah ini:

Hasil uji normalitas yang lainnya, ditunjukkan dengan uji statistik *one-sample Kolmogorov-Smirnov*. Seperti dalam Tabel 4, berikut ini:

Dasar pengambilan keputusan dari *one-sample Kolmogorov-Smirnov* jika hasil *one-sample Kolmogorov-Smirnov* di atas tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, jika hasil *one-sample Kolmogorov-Smirnov* di bawah tingkat signifikansi 0,05 tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa seluruh variabel terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara vari-

abel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas pada suatu model regresi dengan melihat nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Hasil dapat dilihat pada tabel 5, berikut ini:

Dari hasil uji korelasi diantara variabel independen dapat dilihat bahwa korelasi antara variabel tersebut tidak terlalu tinggi. Tidak ada nilai *tolerance* yang di bawah 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas diantara variabel independen. Pengujian ini didukung dengan nilai VIF yang relatif kecil, yaitu tidak ada yang lebih besar dari 10.

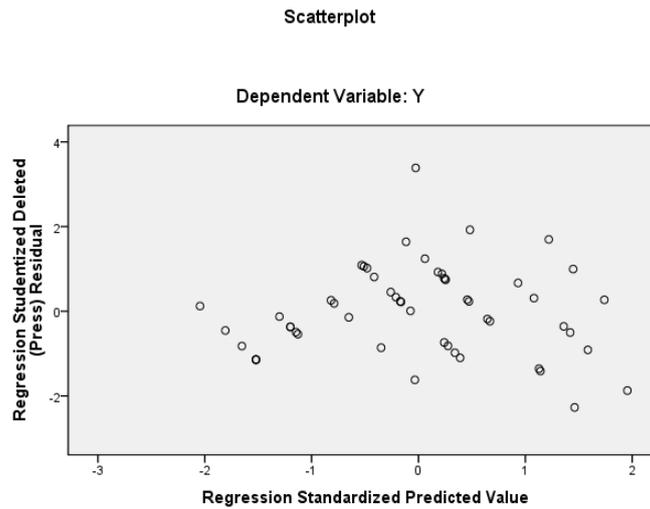
Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot*. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada pola tertentu karena titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heterokedastisitas atau Ho diterima, seperti yang telah digambarkan pada gambar 3, berikut ini:

Tabel 6
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
1 (Constant)	0,160	Tidak terjadi Heterokedastisitas
X ₁	0,250	Tidak terjadi Heterokedastisitas
X ₂	0,844	Tidak terjadi Heterokedastisitas
X ₃	0,887	Tidak terjadi Heterokedastisitas
X ₄	0,892	Tidak terjadi Heterokedastisitas

Sumber: Data diolah, 2013



Sumber: Data diolah, 2013

Gambar 3
Uji Heterokedastisitas

Hasil pengamatan grafik menyatakan bahwa pola penyebaran residual terhadap nilai prediksi Y yang menyebar di sekitar garis horizontal (*standard error of estimate, se=0*) tidak membentuk pola tertentu. Uji *Glejser* menghasilkan nilai *p-value* semua variabel independen lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linear penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 6, berikut ini:

Analisa Koefisien Determinasi Berganda

Koefisien determinasi memakai *Adjusted R Square* karena jumlah variabel independen lebih dari dua (Santoso, 2001). Hasil ditunjukkan pada Tabel 7, berikut ini:

Dari Tabel 7, dapat diketahui bahwa koefisien determinasi berganda bernilai 0,840 atau 84%. Nilai ini menunjukkan bahwa nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) 84% dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (X₁), pemanfaatan teknologi informasi (X₂), sistem

pengendalian intern (X₃) dan pengawasan keuangan daerah (X₄). Sedangkan sisanya 16 % dipengaruhi variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian.

Pengujian Hipotesis

Uji signifikansi simultan (uji statistik f)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu kualitas sumber daya manusia (X₁), pemanfaatan teknologi informasi (X₂), sistem pengendalian intern (X₃) dan pengawasan keuangan daerah (X₄) secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y). Hasil Uji F dapat dilihat dalam Tabel 8.

Tabel 8 diatas, menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 70,346 lebih besar dari F_{tabel} yaitu 2,55 dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari α=5%, artinya bahwa tabel diatas yaitu variabel kualitas sumber daya manusia (X₁), pemanfaatan teknologi informasi (X₂), sistem pengendalian intern (X₃) dan pengawasan keuangan daerah (X₄) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap nilai infor-

Tabel 7
Hasil Analisa Koefisien Determinasi Berganda

Adjusted R Square	Koefisien Determinasi Berganda	Keterangan
0,840	84%	Pengaruh variabel X terhadap Y sebesar 84 %

Sumber: Data diolah, 2013

Tabel 8
Hasil Uji F (Simultan)

F _{hitung}	F _{tabel}	Sig.	Keterangan
70,346	2,55	.000 ^a	Berpengaruh positif signifikan

Sumber: Data diolah, 2013

masi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y).

Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu kualitas sumber daya manusia (X_1), pemanfaatan teknologi informasi (X_2), sistem pengendalian intern (X_3) dan pengawasan keuangan daerah (X_4) secara parsial mempunyai pengaruh secara signifikan atau tidak terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y). Hasil Uji t dapat dilihat dalam Tabel 9.

Berikut ini merupakan hasil dari pengujian yang dilakukan untuk tiap-tiap variabel, yaitu:

1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1) Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Berdasarkan tabel 9, menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 3,098 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,021 dan signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari $\alpha=5\%$, jadi H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Warisno (2009), yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sumber daya manusia merupakan penyanggah utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem dimana tiap-tiap karyawan merupakan bagian yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Berdasarkan tabel 9, menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 2,689 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,021 dan signifikansi sebesar 0,010 lebih kecil dari $\alpha=5\%$, jadi H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum (2010), yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut bisa dilihat dari sebagian besar SKPD di Kabupaten Sampang mempunyai sarana teknologi untuk menunjang pekerjaan, seperti komputer dan pegawai sudah bisa mengoperasikannya karena sudah diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (X_3) Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Berdasarkan tabel 9, menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 3,151 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,021 dan signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari $\alpha=5\%$, jadi H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan den atau 66,7%. Hal yang sama ditunjukkan oleh Indriasari (2008) yaitu bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini juga mendukung

Tabel 9
Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.	Keterangan
X ₁	3,098	2,021	0,003	Berpenga-ruh positif signifikan
X ₂	2,689	2,021	0,010	Berpenga-ruh positif signifikan
X ₃	3,151	2,021	0,003	Berpenga-ruh positif signifikan
X ₄	4,605	2,021	0,000	Berpenga-ruh positif signifikan

Sumber: Data diolah, 2013

- berbagai literatur yang menjelaskan tentang tujuan dari pengendalian intern akuntansi yaitu memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah.
4. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah (X₄) Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Berdasarkan tabel 9, menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 4,605 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,021 dan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α=5%, jadi Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel pengawasan keuangan intern berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pada jawaban kuesioner variabel pengawasan keuangan daerah berada pada kategori baik. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arfianti (2011), yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa semua variabel yaitu kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah mempunyai pengaruh positif signifikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. (1) Hipotesis pertama menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia secara parsial berpengaruh

positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. (2) Hipotesis kedua menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi manusia secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. (3) Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kualitas sistem pengendalian intern manusia secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. (4) Hipotesis keempat menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah manusia secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. (5) Variabel independen yaitu kualitas sumber daya manusia (X₁), pemanfaatan teknologi informasi (X₂), sistem pengendalian intern (X₃) dan pengawasan keuangan daerah (X₄) secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y). Keterbatasan penelitian ini adalah karena penelitian ini menggunakan kuesioner dan peneliti hanya mempunyai waktu yang terbatas, sehingga waktu pengembalian kuesioner hanya dibatasi satu minggu dan kuesioner yang kembali dalam waktu seminggu dianggap sah dan yang tidak kembali dianggap tidak sah/tidak dihitung. memiliki keterbatasan yang perlu diperbaiki. Dari keterbatasan di atas, maka saran yang diberikan untuk diperbaiki oleh peneliti selanjutnya, yaitu (1) Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya, diusahakan dengan menggunakan wawancara, observasi atau menggunakan metode eksperimen sebagai pengganti metode kuesioner. (2) Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek yang akan diteliti, misalnya se-Jawa Timur, atau bahkan se-Indonesia sehingga sampel yang digunakan dalam analisis data akan semakin banyak pula serta menentukan kriteria responden yang lebih akurat lagi agar mendapatkan hasil dan kesimpulan yang lebih digeneralisasikan dari penelitian sebelumnya. (3) Penelitian ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi, untuk mendapatkan hasil yang empirik yaitu dengan menambah variabel lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan

keuangan daerah yang baik, sebaiknya menerima pegawai yang berlatar belakang akuntansi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dengan pendidikan dan pelatihan dibidang keuangan dan komputer.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar. 2007. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri No. 13 pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Tesis*. Medan: Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Arfianti, Dita, 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang). *Jurnal Akuntansi*. Semarang.
- Armando, Gerry. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah di Kota Bukittinggi. *Artikel*. Universitas Negeri Padang.
- Indriasari, Desi. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simpodium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak.
- Jefriando, Maikel, 2013.** BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 9,7 Triliun di Semester II-2012. (<http://finance.detik.com>) diakses tanggal 16 April 2013.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No.1, Hal 1-17.
- Rasul, Sjahrudin. 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- _____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Santoso, Singgih dan Tciptono, Fandi. 2001. *Riset Pemasaran: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. 4 th edition. New York: Jhon Wiley & Sons.Inc.
- Soekarno J, Rahardi. 2012. Pemprov Pertahankan Predikat WTP dari BPK (www.beritajatim.com) diakses 18 April 2013.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmaningrum, Tantriani. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Semarang. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Susanti, Meilia Nur Indah. 2010. *Statistika Deskriptif & Induktif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

- Sutabri, Tata. 2003. *Analisa Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Toha, Suherman. 2007. Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asai Manusia RI.
- Qosasih, Ahsanul, 2012. Kebocoran Anggaran Akibat Ketidapahaman Pejabat. Jakarta. (rri.co.id), diakses tanggal 16 April 2013.
- Warisno. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. *Tesis*. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Winidyaningrum dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia Terhadap Ketepatanwaktuan dan Keterandalan Pelaporan Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.
- _____. Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2012. (www.bpk.go.id) diakses tanggal 16 April 2013.
- _____. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012. (www.bpk.go.id) diakses tanggal 8 April 2013.
- _____. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012. (www.bpk.go.id) diakses tanggal 8 April 2013.
- Zamachsari. 2013. 9 SKPD Pemkab Sampang Tak Punya Pejabat Definitif (www.beritajatim.com) diakses 7 April 2013.
- Zetra, Aidil, dkk. 2009. *Pelaksanaan Manajemen Kinerja di Daerah: Kajian Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok*.